

BAB VI

PENUTUP

6.1. Kesimpulan dan Saran

6.1.1. Kesimpulan

Berdasarkan uraian yang telah di paparkan pada bab IV bagian hasil dan pembahasan, maka penulis dapat mengambil kesimpulan dari rumusan masalah yang di angkat yaitu :

1. Proses rekrutmen politik PDI-P Kabupaten Musi Rawas lebih sering menggunakan sifat atau model rekrutmen “Campuran” artinya menggunakan model rekrutmen politik Top-down maupun Botton-up tidak hanya menggunakan model rekrutmen Top-down ataupun model rekrutmen Botton-up saja. Hal ini memungkinkan bahwa model rekrutmen campuran adalah pilihan yang sesuai dengan kondisi politik saat ini dan menguntungkan partai.
2. Rekrutmen politik di DPC PDI-P Kabupaten Musi Rawas dalam mewujudkan demokrasi di internal partainya sudah berjalan sesuai dengan mekanisme-mekanisme partai melalui mekanisme pendidikan kader (penjejang kader).
3. Dalam proses rekrutmen politik DPC PDI-P Kabupaten Musi Rawas lebih dominan menggunakan sistem sentral atau tersentralistik. Artinya apapun keputusan partai yang sudah di ambil oleh DPP Partai itu

sudah menjadi tanggung jawab dan kewajiban untuk struktur yang berada di bawahnya sebagai bawahan yang menjalankan tugas.

4. Rekrutmen politik yang di lakukan oleh DPC PDI-P Kabupaten Musi Rawas tidak cenderung eksklusif (ekklusifitas) semua sama, PDI-P adalah partai kader. Selagi menguntungkan partai dan bisa memberi dan membesarkan nama partai semua bisa.
5. Dari segi kelembagaan, DPC PDI-P yang berideologikan pancasila tidak menutup diri. Maksudnya tetap membuka diri dalam hal komunikasi dengan komunitas-komunitas atau lembaga-lembaga baik dari masyarakat maupun dengan pihak-pihak yang memberikan kontribusi besar bagi partai.

6.1.2. Saran

Dari hasil penelitian dan kesimpulan yang di dapat dari observasi atau study lapangan peneliti di lapangan maka peneliti mengemukakan beberapa masukan dengan memeberikan saran sebagai berikut :

1. Partai politik harus tetap mempertahankan konsistensi dalam melakukan proses rekrutmen perekrutan sesuai syarat yang ditentukan oleh masing-masing partai sehingga nantinya dihasilkan anggota kader atau legislatif yang berkualitas sesuai ideologi masing-masing partai dan sesuai harapan dari rakyat karena nantinya kader partai yang nantinya menjadi anggota legislatif atau eksekutif merupakan wakil rakyat dalam menyampaikan aspirasi di pemerintahan.

2. partai politik harus mampu melakukan dan menjalankan fungsi rekrutmen politik secara demokratis, transparan dan berbasis meritokrasi.
3. Partai harus membangun dan terus menanamkan sistem kaderisasi, / ideologisasi dan fungsi pendidikan politiknya, sehingga bisa menekan pragmatisme dalam kelembagaan partai.
4. Partai politik harus terhindar dari kebutuhan dana besar sehingga tidak membebani para politisi yang merupakan kadernya agar tidak berlaku koruptif.